



**KEMITRAAN PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE BLOK**

**BEDUL**

(Studi kasus kemitraan Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dengan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kab. Banyuwangi)

***MANGROVE ECOTOURISM MANAGEMENT PARTNERSHIPS BLOCK BEDUL***

*(Partnership Case Study of the National Park Alas Purwo with Sumberasri Village Purwoharjo Sub District Banyuwangi city)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Oleh:

Manahilul Irfan

NIM 080910291006

**PRODI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmannirrohim, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayahnya sampai detik-detik tertulisnya skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam kepada panutanku Nabi Muhammad Saw, dengan keberadaannya terbukalah gerbang ilmu pengetahuan yang mencerahkan seluruh umat di bumi. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda ku, Nur Jatim S.Ag dan Ibunda tercinta Katipah yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, cinta dukungan dan doa yang selalu mengiringi langkah kaki ku dalam menuntut ilmu. yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Merekalah orang tua nomor satu di dunia.
2. Kakakku, Zamroni, Muazisatul Khoiroth dan Ahmat Agus Setiawan terimakasih selama selalu memberikan dukungan moril dan materil untuk segera menyelesaikan karya tulis ini.
3. Kawan seperjuanganku, Irham Maulana Mubbari, Ruslan Wahyudi, Kaharudin Syah, Selvi Triwahyuni, Rafli Zulfikar, Nur Indah, Rizka Hari Candra, Heri Susanto, M.Niamurrohman, Musfiq Hamidi, Mohammad Sholeh, Agung Ramadhan, Aldiansyah Riski, Mohammad Hendra Hermawan, Anisatus Zakyah, Anisatus Susana, Pyta Cristalia. Langkah, mimpi dan usaha keras kita akan tetap berlanjut;
4. Kawan Adimistrasi Negara 08, Tri Andi, Agnes Deva, Masruhen, Ambon, Ifa, Addys Vany, Agus Febryanto, Deni Candra, Yoyok, Fatur, Indra, Indah, Nofita, Randi Aditya, Kiki, Alfi, Ana, dan lain-lain. Terimakasih telah menjadi saudara , sahabat, dan kawan interaksi selama 7 tahun ini.
5. Saudara-Saudaraku di Rumah Perjuangan, yang telah memberikan banyak dukungan dalam kelancaran penulisan skripsi ini

6. Tim Management Lembaga Survey Indonesia (LSI) Area Jawa Timur yang telah memberikan penulis berbagai bentuk ilmu penelitian dan pekerjaan selama ini.



## MOTTO

Dunia ini bagaikan samudra di mana banyak ciptaan ciptaan Nya yang tenggelam. Maka jelajahilah dunia ini dengan menyebut nama Allah. Jadikan ketakutanmu pada Allah sebagai kapal kapal yang menyelamatkanmu. Kembangkanlah keimanan sebagai layarmu, logika sebagai pendayung kapalmu, ilmu pengetahuan sebagai nahkoda perjalananmu dan kesabaran sebagai jangkar dalam setiap badai cobaan.

(Ali bin Abi Thalib RA)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rais, Hanum. 2011. *99 Cahaya di Langit Eropa (Perjalanan Menapak Jejak Islam di Eropa)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Manahilul Irfan

NIM : 080910291006

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul :“Pengelolaan Ekowisata Mangrove Blok Bedul tahun 2015 (Studi kasus kemitraan antara Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dengan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah dituliskan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 November 2015

Yang menyatakan

Manahilul Irfan

NIM 080910291006

**SKRIPSI**

**KEMITRAAN PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE BLOK  
BEDUL**

(Studi kasus kemitraan Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dengan Desa  
Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kab. Banyuwangi)

*MANGROVE ECOTOURISM MANAGEMENT PARTNERSHIPS BLOCK BEDUL*

*(Partnership Case Study of the National Park Alas Purwo with Sumberasri  
Village Purwoharjo Sub District Banyuwangi city)*

Oleh:

Manahilul Irfan

NIM 080910291006

Dosen pembimbing utama : Drs. Anwar, M. Si

Dosen pembimbing anggota : Dr. Sutomo, M.Si

## RINGKASAN

**KEMITRAAN PENGELOLAAN EKOWISATA MANGROVE BLOK BEDUL** (*Studi kasus kemitraan Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dengan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kab. Banyuwangi*). Nama : Manahilul Irfan, NIM : 080910291006, Prodi : Ilmu Administrasi Negara, Jurusan : Ilmu Administrasi, Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Taman Nasional merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem asli dan dikelola oleh Balai Taman Nasional (BTN) dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi (Undang-Undang No. 5, Tahun 1990). Dalam prakteknya, karena berbagai alasan, pengelolaan kawasan konservasi belum dilakukan secara proporsional, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan lebih dominan, aspek pengawetan relative belum banyak di sentuh. Perkembangan kompleksitas permasalahan social, ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia berdampak semakin sulitnya untuk mengelola suatu kawasan konservasi seperti Taman Nasional, sehingga mendorong bagi pengelola Taman Nasional untuk dapat menciptakan suatu system atau mekanisme pengelolaan Taman Nasional sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang di embannya.

Taman Nasional yang juga disebut sebagai kawasan konservasi ternyata tidak dengan otomatis berarti habitat dan keanekaragaman yang berada dalam kawasan tersebut terlindungi dengan baik. Kawasan-kawasan konservasi Taman Nasional di seluruh Indonesia mempunyai masalah-masalah yang mengancam kelestariannya. Salah satu ancaman terhadap kawasan konservasi berasal dari masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Mereka memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti bahan makanan, pakaian dan bahan bangunan dari dalam kawasan. Selain itu mereka juga berkebun dan bahkan bermukim dalam kawasan konservasi. Salah Satu Taman Nasional yang juga mengalami konflik dengan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi adalah Taman Nasional Alas Purwo.

Dalam perjalanan pengelolaan wilayah TNAP, banyak masyarakat di desa penyangga yang banyak menggantungkan perekonomian mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah TNAP. Ketergantungan masyarakat di sekitar wilayah TNAP berdampak pada rusaknya habitat yang berada di kawasan hutan konservasi. puncaknya sekitar tahun 1990an terjadi pemanfaatan hutan kawasan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) yang dilakukan oleh masyarakat di Banyuwangi bagian selatan yang berada disekitar kawasan TNAP yang merupakan kawasan konservasi. Salah satu yang memanfaatkan kawasan TNAP adalah masyarakat di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo yang merupakan salah satu desa penyangga yang letaknya dekat dengan kawasan TNAP Resort Grajagan yang paling dekat dengan kantor pos jaga Resort Grajagan yang terkenal dengan sebutan TNAP blok Bedul.

Demi menanggulangi masalah tersebut, maka Balai Taman Nasional Alas Purwo dan pemerintah desa Sumberasri melakukan kerjasama kolaborasi. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut di lakukan pada januari 2007. Kolaborasi yang dilakukan merupakan perwujudan solusi pengalihan ekonomi masyarakat untuk tidak lagi bergantung pada alam sekitar TNAP. Bentuk kolaborasi ini adalah melakukan berbagai kegiatan pengelolaan wisata antara desa Sumberasri dan TNAP dengan melibatkan masyarakat melalui Ekowisata.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan antara Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dan Desa Sumberasri pada Pengelolaan Ekowisata Mangrove Blok Bedul Tahun 2015.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Kemitraan pengelolaan Ekowisata Mangrove blok Bedul ini merupakan hubungan kerjasama yang saling membutuhkan, dimana dipihak Desa Sumberasri kerjasama ini merupakan upaya untuk merubah perilaku masyarakat desa Sumberasri khususnya yang berada di dusun blok Solo dari yang sebelumnya memanfaatkan hasil hutan yang berakibat pada kerusakan hutan menjadi aktif dalam melestarikan hutan mangrove. Sedangkan di pihak Taman Nasional Alas Purwo, kerjasama ini merupakan

strategi dalam upaya memberdayakan desa penyangga dan menjaga kelestarian Taman Nasional Alas purwo.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kemitraan Pengelolaan Ekowisata Mangrove Blok Bedul (Studi kasus kemitraan Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dengan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Drs. Anwar, M. Si selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberikan bimbingan, bantuan pemikiran, motivasi, harapan dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Dr. Sutomo, M. Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr.Edy Wahyudi, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Dr. Anastasia Murdyatuti, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik;
6. Dra. Inti Wasiati, MM, Selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Ir. Kholid Indarto, selaku kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, yang telah memberikan ijin untuk penelitian.
8. Bapak Sukardiyanto, selaku kepala Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, yang telah memberikan ijin untuk penelitian.

9. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah memberikan pendidikan dan pembelajaran.

Penulis menyadari bahwa didalam Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan sehingga masih diperlukan saran dan kritik yang membangun dari segenap pihak. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi segenap pihak yang membutuhkan.

Jember, 25 November 2015

Penulis

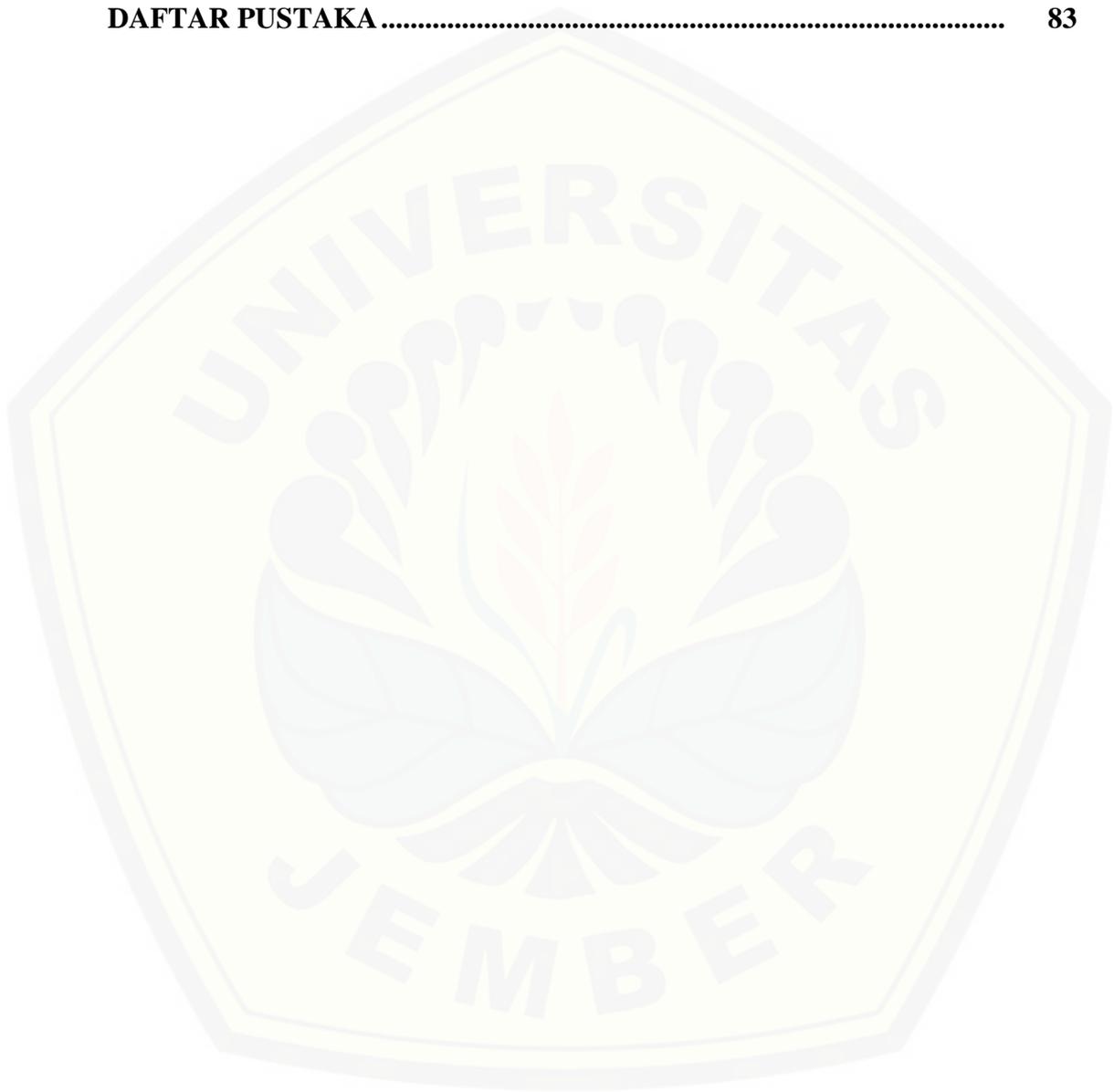


DAFTAR ISI

|  | Halaman    |
|--|------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL</b> .....                  | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....             | <b>ii</b>  |
| <b>HALAMAN MOTTO</b> .....                   | <b>iv</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....              | <b>v</b>   |
| <b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....              | <b>vi</b>  |
| <b>RINGKASAN</b> .....                       | <b>vii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                  | <b>x</b>   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                      | <b>xii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                    | <b>xv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                   | <b>xvi</b> |
| <b>DAFTAR BAGAN</b> .....                    | <b>xvi</b> |
| <b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....              | <b>1</b>   |
| <b>1.1 Latar Belakang</b> .....              | <b>1</b>   |
| <b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....             | <b>8</b>   |
| <b>1.3 Tujuan dan Manfaat</b> .....          | <b>9</b>   |
| 1.3.1 Tujuan .....                           | 9          |
| 1.3.2 Manfaat .....                          | 9          |
| <b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....         | <b>11</b>  |
| <b>2.1 Landasan Teori</b> .....              | <b>11</b>  |
| <b>2.2 Konsep Taman Nasional</b> .....       | <b>12</b>  |
| 2.2.1 Zonasi Taman Nasional.....             | 14         |
| <b>2.3 Konsep Kemitraan</b> .....            | <b>21</b>  |
| 2.3.1 Syarat-syarat Kemitraan.....           | 24         |
| 2.3.2 Pola Kemitraan.....                    | 26         |
| <b>2.4 Konsep Ekowisata</b> .....            | <b>27</b>  |
| 2.4.1 Pendekatan Pengelolaan Ekowisata ..... | 30         |
| 2.4.2 Konsep Pengembangan Ekowisata .....    | 31         |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.4.2 Prinsip Ekowisata.....  | 32        |
| <b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                               | <b>31</b> |
| <b>3.1 Paradigma dan Tipe Penelitian .....</b>                          | <b>31</b> |
| <b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>                            | <b>32</b> |
| <b>3.3 Teknik Penentuan Informan.....</b>                               | <b>32</b> |
| <b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>                                | <b>36</b> |
| <b>3.5 Metode Analisis Data .....</b>                                   | <b>37</b> |
| <b>BAB 4. PEMBAHASAN.....</b>   | <b>43</b> |
| <b>4.1 Deskripsi Daerah Penelitian.....</b>                             | <b>43</b> |
| 4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi .....                          | 43        |
| <b>4.2 Gambaran Umum Wilayah Pengelolaan Ekowisata Mangrove</b>         |           |
| <b>Blok Bedul.....</b>  | <b>45</b> |
| 4.2.1 Letak, Luas dan Batas Areal Pengelolaan Ekowisata .....           | 45        |
| 4.2.2 Kondisi Topografi, Kondisi Geologi dan Tanah.....                 | 46        |
| 4.2.3 Kondisi Iklim .....   | 46        |
| 4.2.4 Potensi Biotik.....   | 46        |
| 4.2.5 Potensi Wisata.....   | 47        |
| <b>4.3 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Sumberasri .....</b>       | <b>48</b> |
| <b>4.4 Sejarah Pengelolaan Wisata Alam Mangrove di Blok Bedul .....</b> | <b>52</b> |
| <b>4.5 Landasan Kebijakan Pengelolaan Ekowisata</b>                     |           |
| <b>Mangrove blok Bedul.....</b>   | <b>57</b> |
| 4.5.1 Dasar Hukum .....   | 57        |
| 4.5.1 Kebijakan Pengembangan Pariwisata .....                           | 57        |
| <b>4.6 Kemitraan antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dan Desa</b>    |           |
| <b>Sumberasri dalam Pengelolaan Ekowisata</b>                           |           |
| <b>Mangrove Blok Bedul .....</b>  | <b>60</b> |
| 4.6.1 Pengelolaan .....   | 60        |
| 4.6.2 Kelembagaan.....  | 69        |
| 4.6.3 Pengembangan .....  | 73        |
| 4.6.4 Pemberdayaan Masyarakat.....                                      | 76        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN</b> ..... | <b>43</b> |
| <b>5.1 Kesimpulan</b> .....              | <b>81</b> |
| <b>5.2 Saran</b> .....                   | <b>82</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....              | <b>83</b> |



**DAFTAR TABEL**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Tabel 3.1 Status dan Peran Informan Pokok dalam Penelitian .....   | 38      |
| Tabel 3.2 Status dan Peran Informan Tambahan dalam Penelitian .....  | 39      |
| Tabel 4.1 Jumlah Penduduk tiap dusun Desa Sumberasri kecamatan<br>Purwoharjo Tahun 2014 .....  | 51      |
| Tabel 4.2 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan<br>Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Tahun 2014 .....  | 51      |
| Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Desa Sumberasri<br>Kecamatan Purwoharjo Tahun 2014 .....   | 52      |
| Tabel 4.4 Kondisi kesehatan desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo<br>Tahun 2014 .....   | 53      |
| Tabel 4.5 Kewajiban Para Pihak Balai Taman Nasional Alas Purwo dan<br>Pemerintah Desa Sumberasri dalam Perjanjian Pengelolaan Kawasan<br>Taman Nasional Alas Purwo ..... | 65      |
| Tabel 4.6 Sarpras yang terletak dalam kawasan Taman Nasional<br>Alas Purwo .....   | 71      |
| Tabel 4.7 Sarpras yang terletak dalam kawasan Perhutani .....  | 71      |
| Tabel 4.8 Kunjungan wisatawan bulan Januari-Oktober 2015 .....   | 72      |
| Tabel 4.9 Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Ekowisata Mangrove<br>Blok Bedul .....   | 78      |
| Tabel 4.10 Paket Ekowisata Mangrove.....   | 79      |
| Tabel 4.11 Pelibatan Masyarakat dalam Kegiatan Ekowisata .....   | 38      |

**DAFTAR GAMBAR**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif ..... | 42      |

**DAFTAR BAGAN**

|  | Halaman |
|--|---------|
| Bagan 4.1 Sturktur Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Blok Bedul ..... | 75      |



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Alam Indonesia memiliki 10% dari seluruh spesies tumbuhan berbunga di dunia, 12% dari seluruh spesies mamalia, 16% dari seluruh spesies reptilia dan amfibi, 17 % dari spesies burung dan 25 % atau lebih dari spesies ikan. Indonesia berada pada peringkat teratas di dunia untuk kekayaan jenis mamalia (515 jenis), teratas untuk kupu-kupu swallowtail (121 jenis), ketiga untuk reptilia (lebih dari 600 jenis), keempat untuk burung (1519 jenis), kelima untuk amfibi (270 jenis), dan ketujuh untuk tumbuhan berbunga (sekitar 27.500 jenis) Anonymous (1993) (dalam Manulang ; 1999).

Jenis-jenis tumbuhan dan satwa tersebut hidup di alam bebas di habitat-habitat yang menyebar di daratan dan laut seluruh nusantara. Upaya-upaya untuk melestarikan jenis-jenis tumbuhan dan satwa tersebut telah diwujudkan dengan menetapkan bentangan-bentangan alam tertentu, baik daratan maupun laut, sebagai kawasan-kawasan konservasi. Menurut Statistik Ditjen PHPA 1997/91998 Indonesia memiliki 374 unit kawasan konservasi dengan luas total 21.711.464,25 ha. Kawasan-kawasan tersebut terdiri dari 347 unit kawasan konservasi daratan dengan luas 17.170.856,90 ha dan 27 unit kawasan konservasi laut seluas 4.54.607,35 ha. Kawasan konservasi darat terdiri dari Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Taman Buru, Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, sedangkan kawasan konservasi laut terdiri dari Taman Nasional Laut, Taman Wisata Laut, Cagar Alam Laut dan Suaka Margasatwa Laut (Manullang, 1999)

Taman Nasional merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem asli dan dikelola oleh Balai Taman Nasional (BTN) dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi (Undang-Undang No. 5, Tahun 1990). Jika dijabarkan secara detail maka pengelolaan Taman Nasional sebagai pelestarian alam sebagai salah satu kawasan konservasi haruslah dikelola dengan

berpedoman pada tiga pilar konservasi yaitu perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan pemanfaatan yang lestari penunjang ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi serta berpedoman pada zonasi yang telah ditetapkan.

Menurut Napitu (2007) Kriteria suatu kawasan hutan ditetapkan sebagai Taman Nasional antara lain meliputi:

1. Kawasan yang ditetapkan mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami;
2. Memiliki sumber daya alam yang khas dan unik baik berupa jenis tumbuhan maupun satwa dan ekosistemnya serta gejala alam yang masih utuh dan alami;
3. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
4. Memiliki keadaan alam yang asli dan alami untuk dikembangkan sebagai pariwisata alam;
5. Merupakan kawasan yang dapat dibagi kedalam Zona Inti, Zona Pemanfaatan, Zona Rimba dan Zona lain karena pertimbangan kepentingan rehabilitas kawasan, ketergantungan penduduk sekitar kawasan, dan dalam rangka mendukung upaya pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, dapat ditetapkan zona tersendiri.

Pengelolaan kawasan konservasi bersendikan 3 pilar : perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Dalam prakteknya, karena berbagai alasan, pengelolaan kawasan konservasi belum dilakukan secara proporsional, kegiatan perlindungan dan pemanfaatan lebih dominan, aspek pengawetan relative belum banyak di sentuh. Perkembangan kompleksitas permasalahan social, ekonomi dan politik yang terjadi di Indonesia berdampak semakin sulitnya untuk mengelola suatu kawasan konservasi seperti Taman Nasional, sehingga mendorong bagi pengelola Taman Nasional untuk dapat menciptakan suatu system atau mekanisme pengelolaan Taman Nasional sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang di embannya.

Taman Nasional yang juga disebut sebagai kawasan konservasi ternyata tidak dengan otomatis berarti habitat dan keanekaragaman yang berada dalam kawasan tersebut terlindungi dengan baik. Kawasan-kawasan konservasi Taman Nasional di seluruh Indonesia mempunyai masalah-masalah yang mengancam kelestariannya. Salah satu ancaman terhadap kawasan konservasi berasal dari masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Mereka memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti bahan makanan, pakaian dan bahan bangunan dari dalam kawasan. Selain itu mereka juga berkebun dan bahkan bermukim dalam kawasan konservasi.

Diperkirakan sejumlah 40 juta orang di Indonesia menggantungkan hidupnya secara langsung kepada keanekaragaman hayati di alam. Dua belas juta di antaranya hidup di dalam dan sekitar hutan dan lebih banyak lagi bergantung kepada sumber daya pesisir (Anonymous, 1993). Pada umumnya masyarakat setempat telah hidup sejak sebelum daerah tersebut ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Mereka telah turun temurun menjalankan kehidupan tradisional mereka yang dicirikan dengan eratnya hubungan mereka dengan alam sekitar. Namun tidak jarang terjadi bahwa masyarakat yang sebenarnya pendatang di daerah tersebut sengaja menerobos ke dalam kawasan untuk mengambil hasil hutan atau membuka kebun karena alasan-alasan ekonomis yang mendesak. Selain itu, diketahui cukup banyak kasus di mana para perambah adalah orang-orang yang dibayar oleh pemilik-pemilik modal di kota untuk membuka kebun-kebun baru dalam kawasan (Manullang, 1999).

Masyarakat di sekitar Taman Nasional atau kawasan konservasi pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berpendidikan rendah, tidak banyak berhubungan dengan dunia luar, sistem pertanian yang sederhana dan belum mengembangkan perilaku petani produsen yang berorientasi ke pasar. Dengan tingkat pengetahuan yang rendah, pendidikan yang rendah, penguasaan ketrampilan dan teknologi yang rendah serta akses pasar yang minim pada umumnya mereka adalah masyarakat yang miskin.

Konflik kepentingan antara masyarakat dan kawasan konservasi menjadi tak terhindarkan di banyak tempat. Kedua belah pihak merasa memiliki alasan

yang kuat untuk mempertahankan kepentingannya di kawasan tersebut. Pendekatan penegakan hukum untuk melindungi kawasan konservasi dari masyarakat yang hidup di sekitarnya sulit mencapai keberhasilan. Sebaliknya, membiarkan masyarakat untuk terus memanen hasil alam secara tidak terkendali dari kawasan konservasi akan secara langsung berakibat buruk bagi kelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Salah Satu Taman Nasional yang juga mengalami konflik dengan masyarakat dalam menjaga kawasan konservasi adalah Taman Nasional Alas Purwo.

Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) merupakan kawasan hutan yang terletak di semenanjung Blambangan Kabupaten Banyuwangi yang memiliki luas wilayah 63.000 hektar. Wilayah TNAP membujur kecamatan Muncar, Tegaldlimo dan Kecamatan Purwoharjo. TNAP merupakan kawasan hutan yang dijaga kelestarian flora, fauna dan plasma nutfah yang ada di dalamnya dan berfungsi sebagai keseimbangan dan keselarasan hutan (RKLT Tahap I Tahun 2007-2011).

Wilayah Taman Nasional Alas Purwo terdiri dari 2 Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) dengan 6 Resort. SPTN I wil. Tegaldlimo dengan membawahi Resort Grajagan, Resort Pancur dan Resort Rowobendo, Sedangkan SPTN II wil. Muncar membawahi Resort Kucur, Resort Sembulungan dan Resort Tanjung Pasir. Sama halnya dengan kawasan konservasi lain, wilayah TNAP juga tidak luput dari konflik dengan masyarakat desa penyangga.

Dalam perjalanan pengelolaan wilayah TNAP, banyak masyarakat di desa penyangga yang banyak menggantungkan perekonomian mereka dengan memanfaatkan sumber daya alam di wilayah TNAP. Ketergantungan masyarakat di sekitar wilayah TNAP berdampak pada rusaknya habitat yang berada di kawasan hutan konservasi. puncaknya sekitar tahun 1990an terjadi pemanfaatan hutan kawasan Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) yang dilakukan oleh masyarakat di Banyuwangi bagian selatan yang berada disekitar kawasan TNAP yang merupakan kawasan konservasi. Karena besarnya kekayaan sumber daya alam yang melimpah baik dari sektor kelautan maupun sektor kehutanan, maka hal ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai mata pencaharian. Kondisi ini

menjadi kebiasaan masyarakat setempat yang sebagian besar untuk penghidupan, kegiatan ini bahkan dilakukan dengan mencuri hasil laut dan hutan yang merupakan kawasan perlindungan dan konservasi TNAP.

Salah satu yang memanfaatkan kawasan TNAP adalah masyarakat di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo yang merupakan salah satu desa penyangga yang letaknya dekat dengan kawasan TNAP Resort Grajagan yang paling dekat dengan kantor pos jaga Resort Grajagan yang terkenal dengan sebutan TNAP blok Bedul. Hampir sebagian masyarakatnya memanfaatkan hutan TNAP dan laut sekitar kawasan TNAP sebagai mata pencaharian. Ketergantungan mereka pada alam sekitar dan semakin berbenturan dengan pelarangan TNAP menjadikan mereka melakukan aksi perambahan, terutama ketika terjadi krisis tahun 1998. Dampaknya adalah hutan mangrove yang termasuk perlindungan kawasan TNAP yang berfungsi sebagai penahan ombak besar menjadi incaran masyarakat untuk pemenuhan ekonomi, Kayu dari mangrove dapat digunakan untuk keperluan kayu bakar maupun keperluan pertanian. Akibatnya adalah banyak habitat mangrove yang rusak, dan hal ini berdampak pada terganggunya ekosistem satwa yang berada di kawasan mangrove.

Demi menanggulangi masalah tersebut, maka Balai Taman Nasional Alas Purwo dan pemerintah desa Sumberasri melakukan kerjasama kolaborasi. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut di lakukan pada januari 2007. Kolaborasi yang dilakukan merupakan perwujudan solusi pengalihan ekonomi masyarakat untuk tidak lagi bergantung pada alam sekitar TNAP. Bentuk kolaborasi ini adalah melakukan berbagai kegiatan pengelolaan wisata antara desa Sumberasri dan TNAP dengan melibatkan masyarakat melalui Ekowisata. Seperti yang di ungkap oleh bapak Sukardiyanto dalam wawancara pada tanggal 20 januari 2015;

“ya demi mengurangi jumlah perusakan hutan di sekitar wilayah bedul ini, kita selaku desa bekerja sama atau bermitra dengan TNAP berusaha agar masyarakat bisa merubah kebiasaan dari merusak kawasan Alas Purwo menjadi ikut dalam pelestarian dengan kegiatan pengelolaan wisata alam terbatas.”

Ekowisata mangrove Blok Bedul merupakan pengembangan dari potensi yang ada dikawasan Taman Nasional Alas Purwo berupa segoro anakan dengan tumbuhan mangrove beserta ekosistem yang ada di dalamnya, hutan tropis di tanah lemarengan dan pantai selatan. Pengelolaan tersebut merupakan kerjasama kolaborasi antara pemerintah desa dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo. penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan wisata tersebut di lakukan pada januari 2007. MoU tersebut merupakan kelanjutan dari ditetapkannya desa Sumberasri sebagai Model Desa Konservasi dari TNAP pada tahun 2006. Pembukaan Ekowisata Mangrove blok Bedul dilakukan pada bulan juli 2009. Untuk mengelola Ekowisata tersebut pemerintah desa membentuk badan pengelola ekowisata mangrove Bedul, yang secara setruktural lembaga pengelola tersebut menjadi salah satu unit usaha BUMDES (RPJM-Desa Sumberasri tahun 2014-2020).

Dari berbagai penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa betapa pentingnya kerjasama atau kemitraan dalam penyelesaian masalah di atas. Seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pasal 10 bahwa:

“Pemerintah memiliki kewajiban mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalm usaha pelestarian daya dukung dan daya tamping lingkungan hidup.”

Undang-undang tersebut menggambarkan hubungan yang di peruntukan bagi masyarakat dan Negara dalam hal pengelolaan dan pelestarian lingkungan.

Menurut Sulistiyani (2004 : 129) kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Bertolak dari pengertian diatas kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Terdapat dua pihak atau lebih. b) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. c) Ada kesepakatan d) Saling membutuhkan. Seperti yang di jelaskan oleh Sulistiyani diatas maka dalam menjaga wilayah konservasi

Taman Nasional Alas Purwo di perlukan sebuah kemitraan Yang mampu mengembalikan dan menjaga wilayah konservasi seperti habitatnya semula.

Sehingga dapat dikatakan bahwa untuk menanggulangi permasalahan diatas pengelolaan ini diatur dalam Perjanjian Pengelolaan Kolaborasi Antara Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dengan Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kab. Banyuwangi yang melibatkan masyarakat sekitar tentang Pengembangan Wisata Alam Terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo. Harapannya dapat menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di kawasan konservasi hutan Taman Nasional Alas Purwo, khususnya yang ada di wilayah resort Grajagan blok Bedul. Penanda tangan nota kesefahaman (MoU) ini dilakukan pada tanggal 31 Januari 2007. dengan maksud dan tujuan sebagaimana di jelaskan dalam pasal 1 antara lain:

Maksud Pengelolaan Kolaborasi adalah membangun kebersamaan dalam rangka mewujudkan kelestarian Taman Nasional Alas Purwo melalui peran serta pihak dalam berbagai kegiatan pengamanan, pelestarian dan pemanfaatan secara bersama-sama sehingga Taman Nasional Alas Purwo tersebut berfungsi optimal dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Sedangkan tujuan Pengelolaan Kolaborasi ini antara lain:

- a. Optimalnya pemanfaatan Taman Nasional Alas Purwo dari sektor wisata alam.
- b. Terwujudnya peningkatan peran serta para pihak khususnya masyarakat Desa Sumberasri.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberasri dan sekitarnya.
- d. Terwujudnya komitmen bersama dalam melaksanakan hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kemitraan antara TNAP dengan Pemerintah Desa

serta partisipasi masyarakat dalam upaya Konservasi hutan Mangrove Blok Bedul kawasan TNAP Resort Grajagan lebih tepatnya yang berada di desa Sumberasri.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu kegiatan penelitian akan dinilai ilmiah apabila berdasarkan prosedur penelitian. Dimana dalam sebuah penelitian tidak mungkin dapat berjalan apabila peneliti tidak menemukan suatu permasalahan apapun. Dalam sebuah penelitian dibutuhkan sebuah perumusan masalah. Dimana perumusan masalah harus dilakukan secara tegas, jelas dan tepat guna memudahkan peneliti dalam menjajaki dan menghimpun data yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada. Menurut Stoner (dalam Sugiyono, 2005:32) bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan serta kompetisi. Adapun bentuk masalah menurut Sugiyono (2005: 35-37) di kelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Permasalahan Deskriptif

Permasalahan yang berkenaan dengan variable mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan dan menghubungkannya.

2. Permasalahan Komparatif

Permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan suatu variabel pada dua sampel atau lebih

3. Permasalahan Asosiatif

Suatu pertanyaan penelitian yang bersifat menghubungkan dua variable atau lebih. Permasalahan ini terdapat tiga macam yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif.

Dalam penelitian ini bentuk permasalahannya adalah bentuk permasalahan deskriptif sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Sugiyono (2008:209) bahwa “Permasalahan Deskriptif adalah suatu permasalahan yang memandu peneliti untuk mengungkapkan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam .”

Berdasarkan penjelasan Sugiyono diatas, penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif, dengan rumusan masalah; *Bagaimana Pelaksanaan Kemitraan antara Taman Nasional Alas Purwo (TNAP) dan desa Sumberasari pada pengelolaan Ekowisata Mangrove Blok Bedul tahun 2015?*

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Setiap aktivitas khususnya yang berkaitan dengan penelitian pasti mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu dengan adanya kejelasan tujuan maka akan memberi arah bagi peneliti untuk melaksanakan penelitian tersebut. Bisa dikatakan tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya suatu hal yang diperoleh setelah penelitian selesai

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mendiskripsikan Pelaksanaan Kemitraan antara Taman Nasional Alas Purwo dan Pemerintah Desa Sumberasri dalam pengembangan Ekowisata Mangrove Blok Bedul yang berada di desa Sumberasri kec. Purwoharjo kab. Banyuwangi.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut:

- a. Bagi Balai Taman Nasional Alas Purwo, Desa Sumberasri dan Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian sumbangan pemikiran, informasi dan evaluasi pada pelaksanaan kemitraan yang terjadi dalam pengembangan Ekowisata Bedul.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan wawasan dan pengetahuan sebagai acuan untuk kemajuan akademik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi penelitian yang serupa khususnya yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

Pada prinsipnya, konsepsi dasar atau kerangka berfikir dalam penelitian ilmiah merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan sebagai pedoman atau pegangan secara umum di dalam menjelaskan dan menggambarkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Untuk menerangkan fenomena tertentu dengan cara menentukan beberapa pengertian/konsep. Konsep digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling keterkaitan. Konsep yang bersifat abstrak ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian sosial. Dalam memahami teori haruslah terlebih dahulu memahami tentang pengertian konsep. Berhubungan dengan konsep, Singarimbun dan Effendi (1995:35) menyatakan bahwa:

“Konsep yakni istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian, melalui konsep penelitian diharapkan akan menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya.”

Peranan konsep dalam penelitian sangat besar karena menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Dalam penelitian sosial peranan ini menjadi semakin penting karena realitas sosial yang menjadi penelitian ilmu sosial banyak yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia sehingga sering timbul masalah dalam pengukuran konsep tersebut. Melalui konsep, peneliti diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan pemikiran kita dengan jalan menggambarkan sejumlah peristiwa. Berdasarkan paparan diatas maka konsepsi dasar yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Taman Nasional

- 2) Kemitraan
- 3) Ekowisata

## 2.2 Konsep Taman Nasional

Taman Nasional merupakan kawasan yang ditetapkan untuk melindungi ekosistem asli dan dikelola oleh Balai Taman Nasional (BTN) dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi (Undang-Undang No. 5, Tahun 1990). Jika dijabarkan secara detail maka pengelolaan Taman Nasional sebagai pelestarian alam sebagai salah satu kawasan konservasi haruslah dikelola dengan berpedoman pada tiga pilar konservasi yaitu perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan pemanfaatan yang lestari penunjang ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi serta berpedoman pada zonasi yang telah ditetapkan.

Kriteria suatu wilayah dapat ditunjuk dan ditetapkan sebagai kawasan taman nasional meliputi:

1. memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik;
2. memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh;
3. mempunyai luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami; dan
4. merupakan wilayah yang dapat dibagi kedalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Taman nasional dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

1. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; misalnya : tempat penelitian, uji coba, pengamatan fenomena alam, dll
2. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; misalnya : tempat praktek lapang, perkemahan, out bond, ekowisata, dll

3. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam; misalnya : pemanfaatan air untuk industri air kemasan, obyek wisata alam, pembangkit listrik (mikrohidro/pikohidro), dll
4. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; misalnya : penangkaran rusa, buaya, anggrek, obat-obatan, dll
5. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya; misalnya : kebun benih, bibit, perbanyakan biji, dll.
6. pemanfaatan tradisional. Pemanfaatan tradisional dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.

Mekanisme pemanfaatan bersama pihak ketiga: terlebih dahulu membangun kesepahaman/kesepakatan/kolaborasi dengan pengelola Taman Nasional dalam rangka pemanfaatan potensi kawasan (sesuai Permenhut nomor P19/ Menhut/2004). Terhadap masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sekitar Taman Nasional dilakukan melalui:

- pengembangan desa konservasi;
- pemberian izin untuk memungut hasil hutan bukan kayu di zona atau blok pemanfaatan, izin pemanfaatan tradisional, serta izin perusahaan jasa wisata alam;
- fasilitasi kemitraan pemegang izin pemanfaatan hutan dengan masyarakat.

## 2.2.1 Zonasi Taman Nasional

Zonasi taman nasional adalah suatu proses pengaturan ruang dalam taman nasional menjadi zona-zona, yang mencakup kegiatan tahap persiapan, pengumpulan dan analisis data, penyusunan draft rancangan zonasi, konsultasi publik, perancangan, tata batas dan penetapan, dengan mempertimbangkan kajian-kajian dari aspek-aspek ekologis, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Kriteria penetapan zonasi dilakukan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis (*sensitivitas ekologi*), urutan spektrum sensitivitas ekologi dari yang paling peka sampai yang tidak peka terhadap intervensi pemanfaatan, berturut-turut adalah zona: inti, perlindungan, rimba, pemanfaatan, koleksi, dan lain-lain. Selain hal tersebut juga mempertimbangkan faktor-faktor: keperwakilan (*representation*), keaslian (*originality*) atau kealamian (*naturalness*), keunikan (*uniqueness*), kelangkaan (*rarity*), laju kepunahan (*rate of exhaustion*), keutuhan satuan ekosistem (*ecosystem integrity*), keutuhan sumberdaya/kawasan (*intactness*), luasan kawasan (*area/size*), keindahan alam (*natural beauty*), kenyamanan (*amenity*), kemudahan pencapaian (*accessibility*), nilai sejarah/arkeologi/ keagamaan (*historical/ archeological/religious value*), dan ancaman manusia (*threat of human interference*), sehingga memerlukan upaya perlindungan dan pelestarian secara ketat atas populasi flora fauna serta habitat terpenting.

Zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari:

1. Zona inti;
2. Zona rimba; Zona perlindungan bahari untuk wilayah perairan
3. Zona pemanfaatan;
4. Zona lain, antara lain:
  - Zona tradisional;
  - Zona rehabilitasi;
  - Zona religi, budaya dan sejarah;
  - Zona khusus.

Berikut penjelasan masing-masing zona :

## 1. Zona Inti

Zona inti adalah bagian taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya masih asli dan tidak atau belum diganggu oleh manusia

yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati yang asli dan khas. Peruntukan Zona inti : untuk perlindungan ekosistem, pengawetan flora dan fauna khas beserta habitatnya yang peka terhadap gangguan dan perubahan, sumber plasma nutfah dari jenis tumbuhan dan satwa liar, untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya.

Kriteria zona inti :

1. Bagian taman nasional yang mempunyai keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
2. Mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya yang merupakan ciri khas ekosistem dalam kawasan taman nasional yang kondisi fisiknya masih asli dan belum diganggu oleh manusia;
3. Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
4. Mempunyai luasan yang cukup dan bentuk tertentu yang cukup untuk menjamin kelangsungan hidup jenis-jenis tertentu untuk menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami;
5. Mempunyai ciri khas potensinya dan dapat merupakan contoh yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi;
6. Mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa liar beserta ekosistemnya yang langka yang keberadaannya terancam punah;
7. Merupakan habitat satwa dan atau tumbuhan tertentu yang prioritas dan khas/endemik;
8. Merupakan tempat aktivitas satwa migran.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona inti meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;

2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. Penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan atau penunjang budidaya;
4. Dapat dibangun sarana dan prasarana tidak permanen dan terbatas untuk kegiatan penelitian dan pengelolaan.

## 2. Zona Rimba

Kriteria zona rimba:

1. Kawasan yang merupakan habitat atau daerah jelajah untuk melindungi dan mendukung upaya perkembangbiakan dari jenis satwa liar;
2. Memiliki ekosistem dan atau keanekaragaman jenis yang mampu menyangga pelestarian zona inti dan zona pemanfaatan;
3. Merupakan tempat kehidupan bagi jenis satwa migran.

Peruntukkan Zona rimba : untuk kegiatan pengawetan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan alam bagi kepentingan penelitian, pendidikan konservasi, wisata terbatas, habitat satwa migran dan menunjang budidaya serta mendukung zona inti. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona rimba meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. Pengembangan penelitian, pendidikan, wisata alam terbatas, pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan penunjang budidaya;
4. Pembinaan habitat dan populasi dalam rangka meningkatkan keberadaan populasi hidupan liar;
5. Pembangunan sarana dan prasarana sepanjang untuk kepentingan penelitian, pendidikan, dan wisata alam terbatas.

### 3. Zona Pemanfaatan

Zona pemanfaatan adalah bagian taman nasional yang letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi/jasa lingkungan lainnya. Peruntukkan Zona pemanfaatan : untuk pengembangan pariwisata alam dan rekreasi, jasa lingkungan, pendidikan, penelitian dan pengembangan yang menunjang pemanfaatan, kegiatan penunjang budidaya.

Kriteria zona pemanfaatan:

1. Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa atau berupa formasi ekosistem tertentu serta formasi geologinya yang indah dan unik;
2. Mempunyai luasan yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam;
3. Kondisi lingkungan yang mendukung pemanfaatan jasa lingkungan, pengembangan pariwisata alam, penelitian dan pendidikan;
4. Merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata alam, rekreasi, penelitian dan pendidikan;
5. Tidak berbatasan langsung dengan zona inti.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona pemanfaatan meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring sumberdaya alam hayati dengan ekosistemnya;
3. Penelitian dan pengembangan pendidikan, dan penunjang budidaya;
4. Pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam;
5. Pembinaan habitat dan populasi;
6. Pengusahaan pariwisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan;

7. Pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan, penelitian, pendidikan, wisata alam dan pemanfaatan kondisi/jasa lingkungan.

#### 4. Zona Tradisional

Zona tradisional adalah bagian dari taman nasional yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang karena kesejarahan mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam. Peruntukkan Zona tradisional : untuk pemanfaatan potensi tertentu taman nasional oleh masyarakat setempat secara lestari melalui pengaturan pemanfaatan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kriteria zona tradisional :

1. Adanya potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati non kayu tertentu yang telah dimanfaatkan secara tradisional oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya;
2. Di wilayah perairan terdapat potensi dan kondisi sumberdaya alam hayati tertentu yang telah dimanfaatkan melalui kegiatan pengembangbiakan, perbanyak dan pembesaran oleh masyarakat setempat guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona tradisional meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Inventarisasi dan monitoring potensi jenis yang dimanfaatkan oleh masyarakat;
3. Pembinaan habitat dan populasi;
4. Penelitian dan pengembangan;
5. Pemanfaatan potensi dan kondisi sumberdaya alam sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

#### 5. Zona Rehabilitasi

Zona rehabilitasi adalah bagian dari taman nasional yang karena mengalami kerusakan, sehingga perlu dilakukan kegiatan pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan. Peruntukkan Zona rehabilitasi : untuk mengembalikan ekosistem kawasan yang rusak menjadi atau mendekati kondisi ekosistem alaminya.

Kriteria zona rehabilitasi :

1. Adanya perubahan fisik, sifat fisik dan hayati yang secara ekologi berpengaruh kepada kelestarian ekosistem yang pemulihannya diperlukan campur tangan manusia;
  2. Adanya invasif spesies yang mengganggu jenis atau spesies asli dalam kawasan;
  3. Pemulihan kawasan pada huruf a dan b sekurang-kurangnya memerlukan waktu 5 (lima) tahun .
6. Zona Religi

Zona religi, budaya dan sejarah adalah bagian dari taman nasional yang didalamnya terdapat situs religi, peninggalan warisan budaya dan atau sejarah yang dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah. Peruntukkan Zona religi, budaya dan sejarah : untuk memperlihatkan dan melindungi nilai-nilai hasil karya budaya, sejarah, arkeologi maupun keagamaan, sebagai wahana penelitian, pendidikan dan wisata alam sejarah, arkeologi dan religius.

Kriteria zona religi, budaya dan sejarah :

1. Adanya lokasi untuk kegiatan religi yang masih dipelihara dan dipergunakan oleh masyarakat;
2. Adanya situs budaya dan sejarah baik yang dilindungi undang-undang, maupun tidak dilindungi undang-undang.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona religi, budaya dan sejarah meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
  2. Pemanfaatan pariwisata alam, penelitian, pendidikan dan religi;
  3. Penyelenggaraan upacara adat;
  4. Pemeliharaan situs budaya dan sejarah, serta keberlangsungan upacara-upacara ritual keagamaan/adat yang ada.
7. Zona Khusus

Zona khusus adalah bagian dari taman nasional karena kondisi yang tidak dapat dihindarkan telah terdapat kelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditetapkan sebagai taman nasional antara lain sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik. Peruntukkan Zona khusus : untuk kepentingan aktivitas kelompok masyarakat yang tinggal diwilayah tersebut sebelum ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional dan sarana penunjang kehidupannya, serta kepentingan yang tidak dapat dihindari berupa sarana telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik.

Kriteria zona khusus :

1. Telah terdapat sekelompok masyarakat dan sarana penunjang kehidupannya yang tinggal sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;
2. Telah terdapat sarana prasarana antara lain telekomunikasi, fasilitas transportasi dan listrik, sebelum wilayah tersebut ditunjuk/ditetapkan sebagai taman nasional;
3. Lokasi tidak berbatasan dengan zona inti.

Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam zona khusus meliputi:

1. Perlindungan dan pengamanan;
2. Pemanfaatan untuk menunjang kehidupan masyarakat dan;

3. Rehabilitasi;
4. Monitoring populasi dan aktivitas masyarakat serta daya dukung wilayah.

## 2.3 Konsep Kemitraan

Sebuah pendekatan baru muncul sebagai solusi untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Pendekatan ini termasuk penerapan tata kelola yang baik yaitu pemerintah dan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat. Salah satu bentuk dari pendekatan ini adalah *Public Private Partnership*. Kemitraan ini dibentuk dalam rangka untuk membantu kolaborasi dari tiga entitas tersebut. *Publik Private Partnership* (PPP) adalah di mana sektor swasta menyediakan investasi modal yang signifikan dalam pengelolaan berskala penyediaan infrastruktur (Soesilo, 2000).

Menurut Sulistiyani (2004:129) mengungkapkan bahwa, “Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berasal dari akar kata *pather*. *Pather* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kampanyon”. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian. Bertolak dari sini maka kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu ataupun tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik”. Bertolak dari pengertian diatas kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) Terdapat dua pihak atau lebih. b) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan. c) Ada kesepakatan d) Saling membutuhkan.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra tersebut dapat memiliki status yang setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan misi ataupun misi berbeda tetapi saling mengisi/melengkapi secara fungsional dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut.

Dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor. 44 Tahun 1997

terutama dalam Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Kemitraan menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 menyatakan bahwa:

“Kemitraan usaha pertanian merupakan salah satu instrumen kerjasama yang mengacu kepada terciptanya suasana keseimbangan, keselarasan dan keterampilan yang didasari saling mempercayai antara perusahaan mitra dengan kelompok melalui perwujudan sinergi kemitraan yaitu terwujudnya hubungan yang:

- 1) Saling membutuhkan, dalam arti pengusaha memerlukan pasokan bahan baku dan petani, nelayan memerlukan penampungan hasil dan bimbingan.
- 2) Saling menguntungkan yaitu baik petani, nelayan maupun pengusaha memperoleh peningkatan pendapatan/ keuntungan disamping adanya kesinambungan usaha.
- 3) Saling memperkuat, dalam arti baik petani, nelayan maupun pengusaha sama-sama melaksanakan etika bisnis, sama-sama mempunyai persamaan hak dan saling membina sehingga memperkuat kesinambungan bermitra.”

Ada beberapa macam tujuan sehingga kemitraan dilakukan oleh dua orang atau lebih Menurut Hafsah (2002), dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kemitraan adalah:

- (1) “Meningkatkan pendapatan
- (2) Meningkatkan perolehan nilai tambah
- (3) Meningkatkan efisiensi
- (4) Menciptakan pemerataan
- (5) Memperluas kesempatan kerja
- (6) Pemberdayaan masyarakat usaha kecil
- (7) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan, wilayah, dan nasional

- (8) Menghindari kecemburuan sosial yang akan menimbulkan gejala social”

Sedangkan tujuan kemitraan usaha menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 menyatakan bahwa “Tujuan Kemitraan Usaha untuk meningkatkan pendapatan, keseimbangan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok mitra yang mandiri”.

Dari berbagai uraian diatas maka disimpulkan kemitraan merupakan jalinan kerjasama usaha yang merupakan strategi bisnis yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan yang disertai adanya satu pembinaan dan pengembangan. Hal ini dapat terjadi karena pada dasarnya masing-masing pihak pasti mempunyai kelemahan dan kelebihan, justru dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing pihak akan saling melengkapi dalam arti pihak yang satu akan mengisi dengan cara melakukan pembinaan terhadap kelemahan yang lain. Pada dasarnya kemitraan itu merupakan suatu kegiatan saling menguntungkan dengan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menghadapi dan memperkuat satu sama lain. Kemitraan merupakan satu harapan yang dapat meningkatkan produktivitas dan posisi tawar yang adil antar pelaku usaha.

Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan yaitu:

1. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

2. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai

berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

### 3. Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi (dalam Kuswidanti: 2008).

Sulistiyani (2004 : 129) menjelaskan ada 3 model kemitraan yaitu:

- a. Kemitraan Semu (*Pseudo partnership*) adalah Suatu persekutuan antara dua pihak atau lebih, namun sesungguhnya tidak melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya.
- b. Kemitraan Mutualistik (*Mutualism partnership*) adalah Persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yakni untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih untuk mencapai tujuan bersama secara optimal.
- c. Kemitraan Konjugasi (*Conjugation partnership*) Yakni kemitraan melalui peleburan dan pengembangan, dimana organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan bersama melebur dan bekerjasama untuk meningkatkan kemampuan masing-masing.

#### 2.3.1 Syarat-Syarat Kemitraan

Bertolak dari pengertian diatas menurut Sulistiyani (2004:129) menyatakan bahwa kemitraan dapat dibentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) “Ada dua pihak atau lebih
- (2) Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan
- (3) Ada kesepakatan
- (4) Saling membutuhkan

Sedangkan Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 terutama pada pasal 10 dan pasal 11 terdapat beberapa Syarat Kemitraan Usaha Pertanian. “Pasal 10 menyebutkan bahwa:

- 1) Kemitraan usaha pertanian dilakukan dengan penandatanganan

perjanjian kemitraan terlebih dahulu.

- 2) Isi perjanjian kerja sama mencakup jangka waktu, hak dan kewajiban termasuk melapor kemitraan kepada Instansi Pembina Teknis di daerah, pembagian resiko penyelesaian bila terjadi perselisihan, klausula lainnya yang memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- 1) Dalam melaksanakan kemitraan, kelompok mitra dapat memanfaatkan fasilitas kredit program dari Pemerintah antara lain KKPA, KUA, KUK dan SKIM kredit lainnya serta dana PEGEL, sedangkan Perusahaan Mitra dapat bertindak sebagai *avails* (penjamin kredit) bagi Kelompok Mitra.
- 2) Dalam melaksanakan kemitraan Perusahaan Mitra dapat memanfaatkan kredit perbankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Tujuan terjadinya suatu kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra. Dengan demikian kemitraan hendaknya memberikan keuntungan kepada pihak-pihak yang bermitra, dan bukan sebaliknya ada suatu pihak yang dirugikan atau merugikan. Untuk terjadinya sebuah kemitraan yang kuat dan saling menguntungkan serta memperbesar manfaat memerlukan komitmen yang seimbang antara satu dengan lainnya (Sulistiyani 2004:130).

### 2.3.2 Pola Kemitraan

Sebagai upaya untuk mewujudkan kemitraan usaha yang mampu memberdayakan ekonomi rakyat sangat dibutuhkan adanya kejelasan peran masing-masing pihak yang terlibat dalam kemitraan tersebut. Dengan demikian diharapkan terukur seberapa jauh pihak-pihak yang terkait telah menjalankan tugas dan peranannya dengan baik. Untuk mencapai sasaran pengembangan tersebut, prioritas yang akan ditempuh adalah mengembangkan usaha ekonomi dan meningkatkan partisipasi masyarakat pedesaan dengan mengembangkan

kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh penerapan sistem usaha secara terpadu, sehingga pengusaha besar dan pengusaha kecil dapat memanfaatkan sumber daya.

Menurut Keputusan Menteri Pertanian Nomor 944/Kpts/OT.210/10/1997 pasal 4 terdapat beberapa pola kemitraan yaitu:

- 1) “Pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksi.
- 2) Pola sub kontra sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.
- 3) Pola Dagang Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra memasarkan hasil produksi kelompok mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra.
- 4) Pola keagenan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan hubungan kemitraan, yang di dalamnya kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra.
- 5) Pola KOA sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) huruf e merupakan hubungan kemitraan, yang didalamnya kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan biaya atau modal dan/atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditi pertanian”.

## **2.4 Konsep Ekowisata (Ecotourism)**

Pengertian tentang ekowisata mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Namun pada hakekatnya, pengertian Ekowisata menurut Fandeli dan Mukhlison (2000) adalah suatu bentuk wisata yang bertanggung jawab terhadap

kelestarian area yang masih alami, memberi manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya masyarakat setempat (dalam Manurung W. 2011). Dirjen Pariwisata (1995) Secara konseptual memdefenisikan ekowisata sebagai suatu konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung upaya-upaya dalam pengelolaan yang konservatif sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat . Masyarakat Ekowisata Indonesia pada tahun 1977 mendefenisikan ekowisata sebagai suatu kegiatan perjalanan wisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami atau daerah-daerah yang dikelola dengan kaidah alam dimana tujuannya selain untuk menikmati keindahannya juga melibatkan unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi alam serta peningkatan pendapatan masyarakat setempat sekitar daerah tujuan ekowisata (dalam Manurung W. 2011).

Menurut Goodwin, 1997:124 (dalam Sastrayuda, Gumelar S. 2010) Ekowisata adalah “Wisata alam berdampak ringan yang menyebabkan terpeliharanya spesies dan habitatnya secara langsung dengan peranannya dalam pelestarian dan atau secara tidak langsung dengan memberikan pandangan kepada masyarakat setempat, untuk membuat masyarakat setempat dapat menaruh nilai, dan melindungi wisata alam dan kehidupan lainnya sebagai sumber pendapatan”. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa :

“Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumberdaya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal.”

Ekowisata yang berasaskan konservasi terhadap keanekaragaman hayati dan ekosistemnya merupakan prinsip yang penting dalam visi ekowisata, ditambah dengan pemberdayaan masyarakat lokal dan pembangunan ekonomi kerakyatan dapat menjadi landasan pengembangan untuk merumuskan misi. Misi ekowisata dapat dijabarkan melestarikan alam dengan mengkonversi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Penciptaan lapangan kerja setempat, pengembangan

ekonomi kerakyatan serta peningkatan pendapatan lokal maupun regional secara adil, dapat dirumuskan sebagai strategi pengembangan ekowisata yang menentukan kewilayahannya berlandaskan ekosistem dan kesatuan pengelolaannya.

Ciri-ciri ekowisata menurut Fandeli dan Mukhlison (2000)(dalam Manurung W; 2011), mengandung unsur-unsur utama yaitu :

1. Konservasi
2. Edukasi dan pemberdayaan *outbound*
3. pemberdayaan masyarakat setempat

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengusaha ekowisata dalam kawasan hutan harus bersasaran :

1. melestarikan hutan dan kawasannya
2. mendidik semua orang untuk ikut melestarikan hutan yang dimaksud, baik pengunjung, karyawan perusahaan sendiri sampai dengan masyarakat di hutan dan sekitarnya
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar dengan demikian tidak mengganggu hutan.

Istilah “ekowisata” dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Para pelaku dan pakar di bidang ekowisata sepakat untuk menekankan bahwa pola ekowisata sebaiknya meminimalkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan budaya setempat dan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan nilai konservasi.

Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah:

- a) Jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (vs mass tourism)
- b) Pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi)
- c) Pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata)

- d) Membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi)
- e) Modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi).

Berbeda dengan wisata pada umumnya, ekowisata merupakan kegiatan wisata yang menarik perhatian besar terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai salah satu isu utama dalam kehidupan manusia, baik secara ekonomi, social maupun politik. Hal ini akan terus berlangsung, terutama didorong oleh dua aspek, yaitu: (1) ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dan lingkungannya makin tinggi, (2) keberpihakan masyarakat kepada lingkungan makin meningkat. Pendekatan aspek yang pertama adalah menyangkut kemampuan dan kebutuhan manusia dimasa mendatang akan keberadaan sumber daya dan lingkungan makin tinggi, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan makin meningkatnya tekanan masyarakat nasional maupun internasional, perlunya perlindungan lingkungan. Bentuk tekanan tersebut seringkali dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang sangat mendasar seperti ekonomi, sosial, politik sehingga proses tarik menarik makin kompleks. Kondisi tersebut telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang mengharuskan berbagai komponen untuk secara bersama-sama melakukan berbagai perlindungan terhadap sumber daya dan lingkungan dalam bentuk kerjasama yang integratif (Sastrayuda 2010).

#### 2.4.1 Pendekatan Pengelolaan Ekowisata

Ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola dengan pendekatan konservasi. Apabila ekowisata pengelolaan alam dan budaya masyarakat yang menjamin kelestarian dan kesejahteraan, sementara konservasi merupakan upaya menjaga kelangsungan pemanfaatan sumberdaya alam untuk waktu kini dan masa mendatang. Hal ini sesuai dengan definisi yang dibuat oleh The International Union for Conservntion of Nature and Natural Resources (1980), bahwa konservasi adalah usaha manusia untuk memanfaatkan biosphere dengan berusaha memberikan hasil yang besar dan lestari untuk generasi kini dan

mendatang.

Sementara itu destinasi yang diminati wisatawan ecotour adalah daerah alami. Kawasan konservasi sebagai obyek daya tarik wisata dapat berupa Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Wisata dan Taman Buru. Tetapi kawasan hutan yang lain seperti hutan lindung dan hutan produksi bila memiliki obyek alam sebagai daya tarik ekowisata dapat dipergunakan pula untuk pengembangan ekowisata. Area alami suatu ekosistem sungai, danau, rawa, gambut, di daerah hulu atau muara sungai dapat pula dipergunakan untuk ekowisata. Pendekatan yang harus dilaksanakan adalah tetap menjaga area tersebut tetap lestari sebagai areal alam.

Pendekatan lain bahwa ekowisata harus dapat menjamin kelestarian lingkungan. Maksud dari menjamin kelestarian ini seperti halnya tujuan konservasi (UNEP, 1980) dalam fandel (2000) sebagai berikut:

1. Menjaga tetap berlangsungnya proses ekologis yang tetap mendukung sistem kehidupan.
2. Melindungi keanekaragaman hayati.
3. Menjamin kelestarian dan pemanfaatan spesies dan ekosistemnya.

Di dalam pemanfaatan areal alam untuk ekowisata mempergunakan pendekatan pelestarian dan pemanfaatan. Kedua pendekatan ini dilaksanakan dengan menitikberatkan pelestarian dibanding pemanfaatan. Pendekatan ini jangan justru dibalik. Kemudian pendekatan lainnya adalah pendekatan pada keberpihakan kepada masyarakat setempat agar mampu mempertahankan budaya lokal dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur conservation tax untuk membiayai secara langsung kebutuhan kawasan dan masyarakat lokal. Ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik, dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar (<http://pengertian-definisi.blogspot.com/2010/10/definisi-ekowisata-ecotourism.html> di akses 04

Februari 2015).

## 2.4.2 Konsep Pengembangan Ekowisata

Untuk mengembangkan ekowisata dilaksanakan dengan cara pengembangan pariwisata pada umumnya. Ada dua aspek yang perlu dipikirkan. Pertama, aspek destinasi, kemudian kedua adalah aspek market. Untuk pengembangan ekowisata dilaksanakan dengan konsep product driven. Meskipun aspek market perlu dipertimbangkan namun macam, sifat dan perilaku obyek dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk menjaga kelestarian dan keberadaannya.

Pada hakekatnya ekowisata yang melestarikan dan memanfaatkan alam dan budaya masyarakat, jauh lebih ketat dibanding dengan hanya keberlanjutan. Pembangunan ekowisata berwawasan lingkungan jauh lebih terjamin hasilnya dalam melestarikan alam dibanding dengan keberlanjutan pembangunan. Sebab ekowisata tidak melakukan eksploitasi alam, tetapi hanya menggunakan jasa alam dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan, fisik/ dan psikologis wisatawan. Bahkan dalam berbagai aspek ekowisata merupakan bentuk wisata yang mengarah ke metatourism. Ekowisata bukan menjual destinasi tetapi menjual filosofi. Dari aspek inilah ekowisata tidak akan mengenal kejenuhan pasar.

## 2.4.3 Prinsip Ekowisata

Pengembangan ekowisata di dalam kawasan hutan dapat menjamin keutuhan dan kelestarian ekosistem hutan. Ecotraveler menghendaki persyaratan kualitas dan keutuhan ekosistem. Oleh karenanya terdapat beberapa butir prinsip pengembangan ekowisata yang harus dipenuhi. Apabila seluruh prinsip ini dilaksanakan maka ekowisata menjamin pembangunan yang ecological friendly dari pembangunan berbasis kerakyatan (community based). The Ecotourism Society (Eplerwood (1999) dalam Fandeli: 2000) menyebutkan ada delapan prinsip, yaitu:

- 1) Mencegah dan menanggulangi dampak dari aktivitas wisatawan terhadap

alam dan budaya, pencegahan dan penanggulangan disesuaikan dengan sifat dan karakter alam dan budaya setempat.

- 2) Pendidikan konservasi lingkungan. Mendidik wisatawan dan masyarakat setempat akan pentingnya arti konservasi. Proses pendidikan ini dapat dilakukan langsung di alam.
- 3) Pendapatan langsung untuk kawasan. Mengatur agar kawasan yang digunakan untuk ekowisata dan manajemen pengelola kawasan pelestarian dapat menerima langsung penghasilan atau pendapatan. Retribusi dan conservation tax dapat dipergunakan secara langsung untuk membina, melestarikan dan meningkatkan kualitas kawasan pelestarian alam.
- 4) Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Masyarakat diajak dalam merencanakan pengembangan ekowisata. Demikian pula di dalam pengawasan, peran masyarakat diharapkan ikut secara aktif.
- 5) Penghasilan masyarakat. Keuntungan secara nyata terhadap ekonomi masyarakat dari kegiatan ekowisata mendorong masyarakat menjaga kelestarian kawasan alam.
- 6) Menjaga keharmonisan dengan alam. Semua upaya pengembangan termasuk pengembangan fasilitas dan utilitas harus tetap menjaga keharmonisan dengan alam. Apabila ada upaya disharmonize dengan alam akan merusak produk wisata ekologis ini. Hindarkan sejauh mungkin penggunaan minyak, mengkonservasi flora dan fauna serta menjaga keaslian budaya masyarakat.
- 7) Daya dukung lingkungan. Pada umumnya lingkungan alam mempunyai daya dukung yang lebih rendah dengan daya dukung kawasan buatan. Meskipun mungkin permintaan sangat banyak, tetapi daya dukunglah yang membatasi.
- 8) Peluang penghasilan pada porsi yang besar terhadap negara. Apabila suatu kawasan pelestarian dikembangkan untuk ekowisata, maka devisa dan belanja wisatawan didorong sebesar-besarnya dinikmati oleh negara atau negara bagian atau pemerintah daerah setempat

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Agar dapat memperoleh data yang menunjang validitas suatu penelitian maka perlu ada metode penelitian sehingga tujuan penelitian yaitu kebenaran obyektifitas dan bersikap ilmiah dapat diperoleh. Menurut Usman dan Akbar (2003:42), “metode didefinisikan sebagai suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis”. Sedangkan menurut Singarimbun dan Effendi (1995:12), “penelitian merupakan suatu proses yang panjang. Berawal pada minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan selanjutnya berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualisasi pemilihan metode penelitian yang sesuai dan seterusnya. Berdasarkan pernyataan menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan pengertian metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang terancang dan sistematis untuk memperoleh pemecahan terhadap segala permasalahan sehingga nantinya akan diperoleh data yang obyektif, valid, dan reliable.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Paradigma dan Tipe Penelitian
2. Waktu dan Tempat Penelitian
3. Teknik Penentuan Informan
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Metode Analisa Data

#### **3.1 Paradigma dan Tipe Penelitian**

Paradigma penelitian ini adalah kualitatif atau peneliti lain menyebutnya paradigma naturalistik. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2000:3) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Selanjutnya menurut Moleong (2006:6) pengertian penelitian kualitatif adalah: Penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Tipe penelitian yang digunakan ialah deskriptif atas model implementasi yang dikembangkan oleh George Edward III. Menurut Sugiono (2005:11) Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Sedangkan Tipe penelitian deskriptif menurut Narbuko dan Acmadi (2003:44) yaitu, “penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan.”

Dari penjelasan diatas dalam paradigma penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif dapat disimpulkan adalah sebuah penelitian yang mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan lapangan tentang suatu objek, akibat, gejala maupun kondisi atau keadaan dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan secara detail kedalam suatu bentuk catatan atau tulisan secara sistematis.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan yang ditetapkan. Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan sengaja (*Purposive Sampling Method*), yaitu di Kabupaten Banyuwangi khususnya di desa Sumberasri kecamatan Purwoharjo. Dimana terjalin kemitraan antara desa Sumberasri dengan Balai Taman Nasional Alas Purwo. Penelitian ini dilaksanakan pada waktu yang di tentukan.

### 3.3 Teknik Penentuan Informan

Informan atau aktor kunci dalam penelitian lapangan merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat menjadi informan, tidak semua orang dapat menjadi informan yang baik (Spradley,1979:45) dalam Ruslam Ahmadi (2014:92). Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2006:132). Selanjutnya menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2006:132) pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai *sampling internal*, karena informan dimanfaatkan berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Menurut Moleong (2006:133) usaha untuk mencari informan dapat dilakukan dengan cara: (1) melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda. (2) melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan diatas.

Menurut Faisal (1990:56) kriteria untuk menentukan informan adalah sebagai berikut :

1. Subyek yang telah cukup lama intensif dengan kegiatan untuk medan aktivitas yang menjadi perhatian peneliti.
2. Subyek yang masih terlibat aktif atau penuh dalam lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti.
3. Subyek yang memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan.
4. Subyek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah untuk diminta informasi atau dikemas terlebih dahulu.
5. Subyek yang sebelumnya tergolong asing dengan peneliti.

Sedangkan menurut Neuman dalam Ruslam Ahmadi (2014:93) bahwa informan memiliki empat karakteristik sebagai berikut:

1. Informan memahami betul kultur setempat dan menyaksikan kejadian-kejadian disana. Dia tinggal dan menjalani kultur setempat dan terlibat dengan kegiatan rutin di tempat itu. Dia kental dengan pengalaman kultur tersebut dan bukan sekedar orang baru disana.
2. Informan harus terlibat saat itu.
3. Informan bisa meluangkan waktu bersama peneliti. Wawancara bisa membutuhkan waktu berjam-jam dan sebagian anggota mungkin tidak bersedia untuk mengikuti wawancara yang lama.
4. Orang nonalitis bisa menjadi informan yang lebih baik orang nonalitis memahami dan menggunakan teori masyarakat asli setempat atau logika pragmatis. Ini berbeda dengan informan analitis yang melakukan pranalisis latar, menggunakan kategori dari media, dan pendidikan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel atau informan dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2008:53-54) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah:

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.”

Agar mendapatkan data yang lebih sesuai dengan harapan penelitian dan memuaskan, maka peneliti menambahkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel atau informan dengan dengan metode *snowball sampling*. Hal ini dilakukan supaya peneliti mendapatkan informasi ke informasi berikutnya sesuai dengan rekomendasi dari informan sebelumnya. menurut Sugiyono (2008:54) menjelaskan bahwa *snowball sampling* adalah:

“teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah

sumber data yang sedikit itu tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding, lama-lama menjadi besar.”

Adapun informan pokok atau utama dalam penelitian ini di sebutkan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Status dan Peran Informan Pokok dalam Penelitian

| Informan           | Status dan Peran  |
|--------------------|---|
| Bapak Hariyanto    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala TNAP Resort Grajagan</li> </ul>   |
| Bapak Sri Widodo   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendali Ekosistem Hutan TNAP Resort Grajagan</li> </ul>   |
| Bapak Suyatno      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantan Kepala Desa Sumberasri dan Pencetus berdirinya Ekowisata Mangrove Bedul</li> </ul>                  |
| Bapak Sukardiyanto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Desa Sumberasri</li> </ul>  |
| Bapak Hefy Wahyudi | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua BUMDES Loh Jinawi desa Sumberasri</li> </ul>   |
| Bapak Miseri       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang dahulunya menjadi perambah hutan dan sekarang menjadi anggota BUMDES Loh Jinawi</li> </ul> |
| Bapak Suyono       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang dahulunya menjadi perambah hutan dan sekarang menjadi anggota BUMDES Loh Jinawi</li> </ul> |

Dalam penelitian ini juga menggunakan informan pendukung, informan pendukung ini merupakan orang-orang yang mengetahui ataupun tidak terlibat aktif dalam pengelolaan ekowisata secara langsung. Informan pendukung ini adalah masyarakat yang menempati wilayah di sekitar ekowisata. Informan pendukung ini di sebutkan dala tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Status dan Peran Informan Tambahan dalam Penelitian

| Informan           | Status dan Peran   |
|--------------------|--|
| Bapak Sunardiyanto | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Dusun Bloksolo</li> </ul>  |
| Bapak Sutomo       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang bertempat tinggal di lahan milik TNAP yang bersebelahan dengan area Ekowisata</li> </ul>      |
| Bapak Imam Sugro   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang dahulunya seorang nelayan dan sekarang menjadi kelompok nelayan di Desa Sumberasri</li> </ul> |
| Bapak Yanto        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masyarakat yang berprofesi menjadi penjual makanan dan minuman di kawasan TN Alas Purwo</li> </ul>            |

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan data akan mempermudah untuk menganalisa suatu masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Primer

##### 1. Interview (wawancara)

*Interview* atau wawancara menurut Esterberg yang dikutip oleh Sugiyono, (2008:72) adalah “merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Dari pengertian ini dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wawancara atau interview merupakan suatu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Disini responden akan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan permasalahan yang

sedang diteliti. Selain itu, dengan wawancara akan dapat menggali jawaban lebih jauh dan mendalam tentang permasalahan yang diteliti.

## 2. Observasi

Metode observasi bertujuan untuk melihat dan mengetahui keadaan daerah penelitian dan mengamati kegiatan serta gejala-gejala yang ada di daerah penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode observasi atau pengamatan secara langsung ini dilakukan oleh peneliti dengan cara melihat dan mencatat secara sistematis tingkah laku atau kejadian-kejadian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sebagai metode ilmiah, observasi biasanya diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang akan diselidiki. Dalam arti luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak secara langsung.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pihak kedua. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh pihak pengumpul data. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Guba dan Lincoln yang dikutip oleh Moleong (2006:216) “ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik”. Menurut Usman dan Akbar (2003:73), teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Contohnya: buku-buku, foto-foto, artikel, dsb. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relatif murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari

dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan dalam keseluruhan proses penelitian sejak awal sampai akhir dengan menggunakan literature-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian.

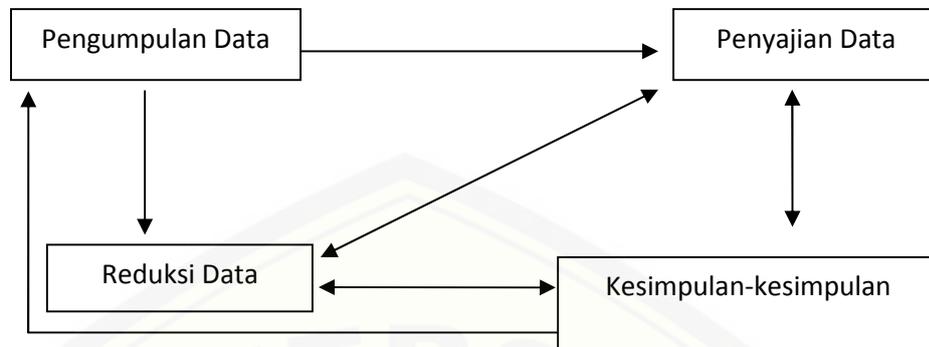
### 3.5 Metode Analisis Data

Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Data-data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dipelajari, ditelaah untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif. Bodgan dan Taylor (dalam Moleong 2006:280) mendefinisikan analisis data sebagai berikut :

Analisa data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan lapangan dan bahan-bahan lain yang ditemukan dilapangan. Kesemuanya itu dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan temuan penelitian kepada orang lain.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992). Selanjutnya dalam model tersebut Miles dan Huberman (1992:15-20) mengutarakan bahwa didalam model analisis interaktif terdapat tiga aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang oleh peneliti antara lain:

Gambar 3.1 Skema Model Analisis Interaktif



Sumber: Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2008:92)

a. Reduksi data

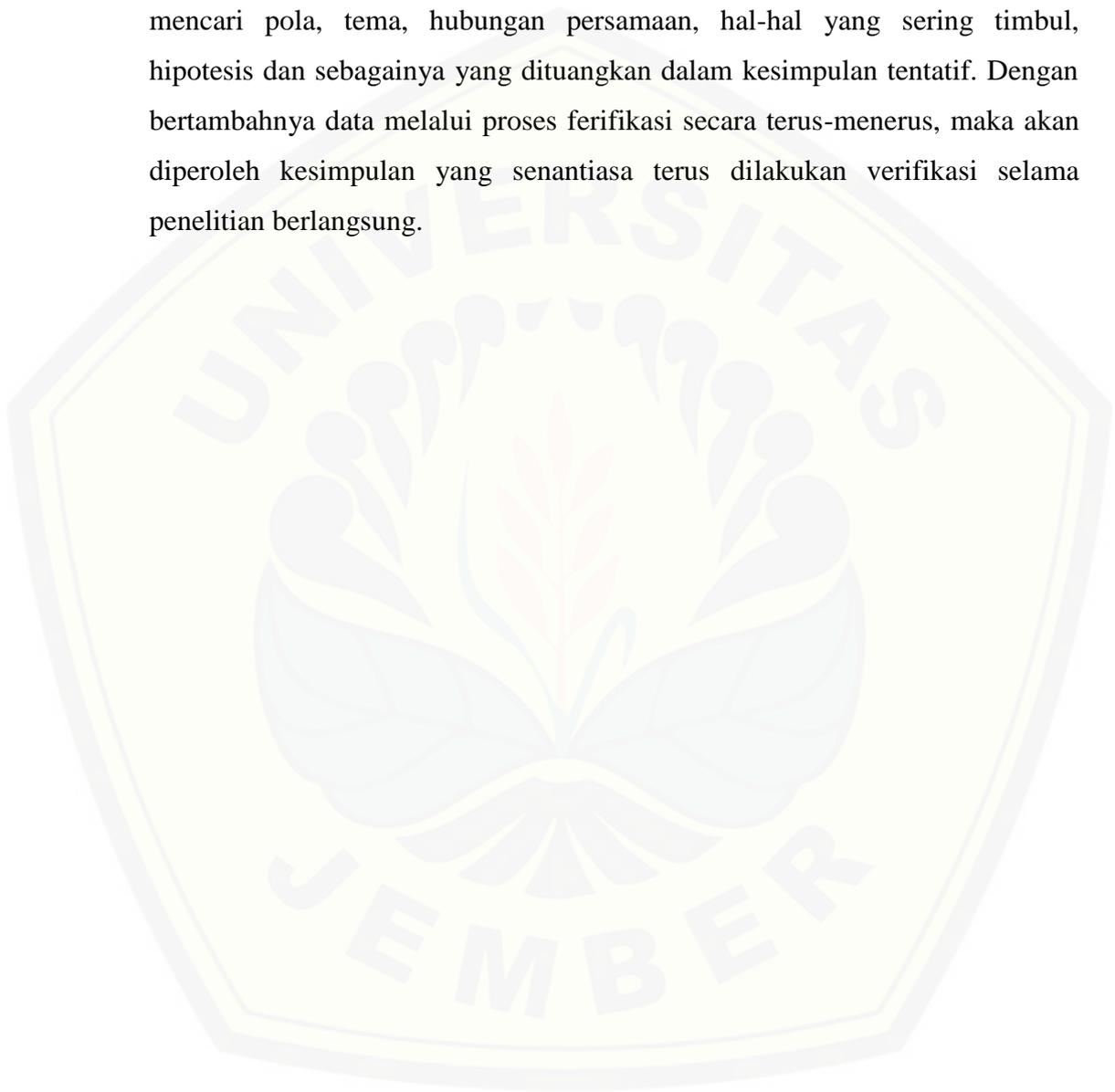
Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh dilokasi penelitian (lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan itu kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari temanya atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung, diadakan tahap reduksi data selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo).

b. Penyajian Data

Untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian. Penyajian dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Peneliti setelah melakukan verifikasi secara terus-menerus sepanjang proses berlangsung akan menarik suatu kesimpulan. Proses yang dimaksud disini adalah proses sejak awal seorang peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan tentatif. Dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.



## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian oleh peneliti tentang Kemitraan Pengelolaan Ekowisata Mangrove Blok Bedul ini merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh Balai Taman Nasional Alas Purwo (BTNAP) dengan desa Sumberasri. Dimana bentuk kerja-sama ini berupa kolaborasi pengelolaan wisata alam dari pemanfaatan hutan Taman Nasional sebagai pariwisata. Kerjasama ini terjalin akibat perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa sumberasri khususnya masyarakat di dusun Blok Solo. Dalam pengelolaannya Ekowisata ini di kelola oleh Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul (BPEMB). Dari hasil kerjasama ini dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kemitraan pengelolaan Ekowisata Mangrove blok Bedul ini merupakan hubungan kerjasama yang saling membutuhkan, dimana dipihak Desa Sumberasri kerjasama ini merupakan upaya untuk merubah perilaku masyarakat desa Sumberasri khususnya yang berada di dusun blok Solo dari yang sebelumnya memanfaatkan hasil hutan yang berakibat pada kerusakan hutan menjadi aktif dalam melestarikan hutan mangrove. Sedangkan di pihak Taman Nasional Alas Purwo, kerjasama ini merupakan strategi dalam upaya memberdayakan desa penyangga dan menjaga kelestarian Taman Nasional Alas purwo.
2. Kerjasama kolaborasi ini juga sudah memberdayakan masyarakat dusun blok solo yang dulunya penjarah hutan menjadi pengelola wisata, pengemudi perahu dan penjual makanan dan minuman di dalam Ekowisata Mangrove blok Bedul.
3. Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul sudah melaksanakan perannya sebagai pengelola dalam menyediakan sarana-prasarana yang ada di wilayah Ekowisata Mangrove blok Bedul

4. Dalam perjalanan pengelolaan Ekowisata ini terjadi ketidak Harmonisan antara Badan Pengelola Ekowisata Mangrove Bedul dengan BUMDES desa Sumberasri.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan dilapangan. Terdapat beberapa hal yang menjadi saran berkenaan dengan kerjasama pengelolaan Ekowisata Mangrove blok Bedul, yaitu:

1. Pengelolaan Ekowisata Mangrove blok Bedul ini kurang di kelola secara maksimal. Hal ini terlihat dari rusaknya beberapa sarana-prasarana yang ada di tempat Ekowisata. seperti Ghasibo dan jembatan penyebrangan.
2. Perlu adanya perbaikan atau pengadaan perahu Gondang-gandung yang lebih layak dalam upaya pelayana kepada pengunjung Ekowisata Mangrove bedul.
3. Pengelola Ekowisata Mangrove perlu melakukan promosi wisata secara massif baik di media cetak, elektronik maupun media sosial.
4. Pengelola Ekowisata perlu melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Bumdes dalam upaya pengembangan Ekowisata Mangrove Blok Bedul.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta; Ar-Ruzz Media
- Fandeli, Chafid. *Pengertian dan Konsep Dasar Ekowisata*. (<http://wisatadanbudaya.blogspot.com/2009/09/pengertian-dan-konsep-dasar-ekowisata.html> di akses 4 Februari 2015 pukul 01.20 wib).
- Faisal, Sanapiah. 2005. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Kementrian Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi, Balai Taman Nasional Alas Purwo. *Laporan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Taman Nasional Alas Puwo Tahun 2011* . Banyuwangi. 2012 (<http://tnalaspurwo.org/wp-content/uploads/2013/01/TNAP-LAKIP-2011.pdf> di akses tanggal 12 januari 2015 pukul 20.05 wib).
- Moelog, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Moelog, Lexy. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. *Laporan Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013*. Banyuwangi 2014 (<http://www.banyuwangikab.go.id/media/doc/edoc/lakipbanyuwangi2013.pdf> di akses tanggal 12 januari 2015 pukul 20.20 wib).
- Pemerintah Desa Sumberasri, 2011. *Rencana Kerja Lima Tahun Tahap I Tahun 2007-2011(Pengelolaan Wisata Alam terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo Kerjasama Kolaborasi antara Pemerintah desa Sumberasri dan Balai Taman Nasional Alas Purwo Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur)*.

Pemerintah Desa Sumberasri, 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah-Desa Sumberasri Tahun 2014-2020*.

Sastrayuda, Gumelar S. 2010. Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort and Leisure. ([http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR\\_S/HAND\\_OUT\\_MATKUL\\_KONSEP\\_RESORT\\_AND\\_LEISURE/PENGEMBANGAN\\_KAWASAN\\_DESA\\_WISATA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/LAINNYA/GUMELAR_S/HAND_OUT_MATKUL_KONSEP_RESORT_AND_LEISURE/PENGEMBANGAN_KAWASAN_DESA_WISATA.pdf) di akses 3 Februari pukul 23.30 wib).

Singarimbun, M., Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Soemarno. 2008. Bahan ajar. *Konsep wisata alam berbasis Hutan*. (<http://marno.lecture.ub.ac.id/files/2012/02/KONSEP-WISATA-ALAM-BERBASIS-HUTAN.doc> di akses 10 februari 2015 pukul 15.09 wib).

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.

Sulistiyani, Ambar Teguh. (2004) *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: IKAPI.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Usman, H., Akbar, P. S. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

## JURNAL

Kuswidanti. 2008. *Gambaran kemitraan lintas sektor dan organisasi di bidang kesehatan dalam upaya penanganan flu burung di bidang komunikasi Komite Nasional Flu Burung dan Pandemi Influenza (Komnas FBPI) Tahun 2008*. Fakultas Kesehatan Masyarakat. Universitas Indonesia (<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/122823-S-5461-Gambaran%20kemitraan-Tinjauan%20literatur.pdf> di akses pada tanggal 17 Februari 2015 pukul 23.15 wib).

- Napitu, Ja Posman dan Marsono, Djoko. 2007. *Pengelolaan Kawasan Konservasi. Prodi Konservasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta.*
- Manurung, W. 2011. *Evaluasi Ekonomi Hutan sebagai Penyedia Jasa Wisata Alam di Kawasan DAS Deli.* Departemen Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. (<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24675/3/Chapter%20II.pdf> f. Di akses pada 15 februari 2015 pukul 22.30 wib)
- Manullang, Sastrawan. Protected Areas Community Development Specialist. 1999. *Kesepakatan Konservasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi.* Natural Resources Management. Jakarta.

#### **UNDANG-UNDANG**

- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang *Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya*
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Alas Purwo, Nomor:SK.286/BTNAP-1.5/2012 tentang *Pemberian Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Kepada BUMDES Firma Loh Jinawi di Kawasan TN Alas Purwo, Kab Banyuwangi, Prov Jawa Timur.*
- Keputusan Menteri Pertanian no 940/Kpts/Ot.210/10/1997 tentang *Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian.*
- Perjanjian Pengelolaan Kolaborasi antara Balai Taman Nasional Alas Purwo dengan Desa Sumberasri Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi tentang *Pengembangan Wisata Alam Terbatas di Blok Bedul Taman Nasional Alas Purwo.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang *Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.*
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 56 tahun 2006 tentang *Pedoman Zonasi Taman Nasional.*

Peraturan Desa Sumberasri nomor 5 tahun 2014 tentang *Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Loh Jinawi” Desa Sumberasri.*

**INTERNET**

[Http://www.tempo.co/read/news/2012/05/31/199407289/Wisata-Mangrove-Banyuwangi-Percontohan-Nasional](http://www.tempo.co/read/news/2012/05/31/199407289/Wisata-Mangrove-Banyuwangi-Percontohan-Nasional) (di akses tanggal 12 januari 2015 pukul 20.25 wib).

[Https://desawisatasumberasri.wordpress.com/](https://desawisatasumberasri.wordpress.com/) (di akses tanggal 12 januari 2015 pukul 20.30 wib).

[Http://www.banyuwangitourism.com](http://www.banyuwangitourism.com) (di akses tanggal 12 januari 2015 pukul 20.00 wib).

[Http://travel.kompas.com/read/2014/05/18/2015113/blok.bedul.wisata.mangrove.di.banyuwangi](http://travel.kompas.com/read/2014/05/18/2015113/blok.bedul.wisata.mangrove.di.banyuwangi) (di akses 29 januari 2015 pukul 22.40 wib).

[Http://travel.kompas.com/read/2014/05/18/2015113/blok.bedul.wisata.mangrove.di.banyuwangi](http://travel.kompas.com/read/2014/05/18/2015113/blok.bedul.wisata.mangrove.di.banyuwangi) (di akses 29 januari 2015 pukul 22.54 wib).

[Http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf\\_thesis/unud-521-babi.pdf](http://www.pps.unud.ac.id/thesis/pdf_thesis/unud-521-babi.pdf) (di akses 16 februari 2015 pukul 08.07 wib).